



Anggaran Pemeliharaan Aset

Puspem Rp 8 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Anggaran pemeliharaan aset milik Pemerintah Kabupaten Badung, terutama di kawasan pusat pemerintahan (Puspem) mencapai Rp 8 miliar. Yang paling banyak mengurus anggaran seperti perbaikan saluran air, penggantian bola lampu, termasuk perbaikan dak beton untuk mengantisipasi kebocoran saat musim penghujan.

Dari anggaran ini pula, paving dalam kondisi compang-camping juga diperbaiki. Perbaikan bertahap sejak awal bulan lalu. "Iya ada perbaikan memang ini bagian dari pemeliharaan. Kan ada yang rusak, itu diperbaiki. Jadi tidak semua," ujar Kabag Aset Pemkab Badung I Wayan Puja, Minggu (15/11).

Bahkan saluran drainase pada beberapa titik rawan terjadi genangan air ikut diperbaiki. Basement kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Badung, yang sempat terendam banjir tahun lalu tak luput mendapatkan

perawatan. Hal tersebut demi mengantisipasi kejadian serupa terulang.

Wayan Puja mengatakan, pemeliharaan yang dilakukan



DUA pekerja sedang memperbaiki jalan paving yang rusak di areal Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Minggu (15/11). Perbaikan ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang dilakukan Bagian Aset Pemkab Badung.

• NUSABALI/YUDA

sifatnya rutin. Namun karena sebentar lagi masuk musim penghujan, antisipasi saluran air tersumbat, dak beton yang rawan bocor mendapatkan perhatian ekstra. "Sebetulnya ini pemeliharaan rutin," ucapnya.

Ditanya mengenai anggaran pemeliharaan fasilitas dan aset milik Pemkab Badung, mantan camat Kuta Selatan itu mengaku tak hafal perinciannya. Tetapi total berkisar Rp 8 miliar. "Tahun ini anggaran

pemeliharaan Rp 8 miliar. Untuk persisnya saya lupa, anggaran semuanya untuk keperluan perbaikan, entah itu berkenaan dengan mekanikal, elektrikal maupun sipil arsitektur," jelas Wayan Puja. Meski demikian, pihaknya tidak memungut bila sejauh ini anggaran masih terserap sekitar Rp 5 miliar lebih. Sehingga memungkinkan masih ada sisa. **asa**



Dewan Pengeng Pencairan Bansos Tak Pasti

Bansos belum bisa dibayarkan karena belum ada regulasi yang mengatur secara detail dan mendasari pencairan jatah dana di pos ini.

SINGARAJA, NusaBali

Pencairan jatah hibah bansos bagi anggota DPRD Buleleng di tahun 2015, ternyata belum ada kepastian. Kalangan dewan pun ketar-ketir dan bertambah pusing alias pengeng karena waktu yang tersisa tinggal sebulan lagi hingga Desember.

Konon kabarnya, lembaga DPRD

Buleleng sempat membahas persoalan tersebut dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng. Data dihimpun Minggu (15/11) di tahun 2015, masing-masing anggota Dewan mendapat jatah hibah bansos sebesar Rp 500 juta. Nah dari jumlah itu, sekitar seratusan juta yang belum bisa dicairkan. Padahal, waktu yang tersisa tinggal beberapa pekan lagi hingga tutup tahun.

Ketua DPRD Gede Supriatna Minggu (15/11) mengakui masih ada jatah hibah bansos untuk anggota Dewan yang belum direalisasikan. Tadinya pihaknya berharap jatah hibah bansos itu bisa direalisasikan setelah ada penjelasan dari Kemendagri melalui surat bernomor 900/4627/SJ tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Namun, nyatanya jatah hibah bansos anggota Dewan tidak bisa direalisasikan.

"Kita masin menunggu ketentuan yang mengatur tentang tata cara pencairan hibah bansos. Dan dari rapat belum ada solusi untuk mencairkan bansos. Tapi kemarin sudah ada penjelasan katanya bisa dicairkan segera," jelas Supriatna.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara menyatakan sambil menunggu kepastian regulasi, dirinya meminta agar anggotanya membuat daftar rekapitulasi proposal yang belum terealisasi. "Silahkan buat dulu rekapitulasi proposal yang belum cair dan sambil menunggu regulasi terbaru terbit. Penerima bansos juga diberikar penjelasna dan yang jelas bansos dalam proses dan pasti akan direalisasikan," katanya.

Sementara Kepala BPKAD Bimantara mengakui dana bansos belum bisa dibayarkan karena belum ada regulasi yang mengatur secara detail terkait pembayaran dana ini. Sampai sekarang ini pihaknya belum menemukan aturan yang mendasari pencairan jatah dana bansos.

Satu-satunya regulasi yang menjadi pegangan sekarang adalah UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Regulasi ini hanya mengatur bahwa belanja hibah dan bansos yang dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

"Sampai sekarang kami belum menemukan aturan yang terbaru dan terkecuali UU No. 23 Tahun 2014 itu, sehinga kami juga tidak

bisa berbuat banyak terkecuali menunggu sampai ada aturan yang terbaru," tegasnya.

Di sisi lain Bimantara mengatakan, berdasarkan penegasan Badan dan Lembaga Hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, sosial dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan catatan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gubernur atau Bupati/ Walikota. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia seperti ormas yang berbadan hukum yayasan, atau ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. **k19**



Pencairan Bansos Mulai Diproses **Cukup Pakai SKT Kesbanglimaspol**

DENPASAR, NusaBali

Dana bantuan sosial (bansos)/hibah untuk masyarakat yang difasilitasi DPRD Bali melalui APBD Perubahan 2015, sudah dimulai proses pencairannya di SKPD lingkup Pemprov Bali. Bagi penerima dana bansos di luar desa adat, cukup pencairan menggunakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbanglimaspol.

Dimulainya proses pencairan bansos ini diungkapkan Ketua Pansus APBD Induk 2016 DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, kepada NusaBali di Denpasar, Minggu (15/11). Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng ini, proses pencairan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Cukup Pakai SKT Kesbanglimaspol

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

bansos sudah maju ke SKPD.

Kariyasa Adnyana menegaskan, pencairan dana bansos untuk masyarakat sudah tak ada masalah lagi. Bagi penerima bansos yang tidak bernaung di bawah desa adat, mereka tinggal dibuatkan SKT di Kesbanglimaspol.

"Dasar hukumnya itu tetap Peraturan Gubernur (Pergub). Lagian, APBD Perubahan 2015 'kan menjadi satu kesatuan dengan APBD Induk 2015. Prosesnya sama, verifikasi di pusat juga sama," jelas Kariyasa Adnyana.

"Jadi, sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal penerima bansos yang tidak berada di bawah naungan desa adat itu dibuatkan SKT di Kesbanglimas. Kalau penerima hibah yang bernaung di bawah desa adat, sudah jelas ada payung hukumnya," lanjut polisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng ini.

Ditambahkan Kariyasa, dengan adanya kepastian ini, maka penerima dana hibah tidak perlu lagi ketar-ketir. Sebab, aspirasi mereka

terakomodasi. Yang mengusulkan bansosnya di SKPD, sekarang tinggal mengikuti.

"Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran hibah tidak akan cair. Kita pun sempat menerima beberapa kali pertanyaan. Setelah kita jelaskan, masyarakat akhirnya mengerti dan mereka pahami situasi dan aturan yang berubah terus. Tapi, intinya sekarang sudah mulai proses, tak ada persoalan lagi," katanya.

Pencairan dana bansos ini, kata Kariyasa, menjadi harapan masyarakat di desa adat dan para sekaa di banjar-banjar. Sebab, bansos juga sangat penting bagi pelestarian adat dan budaya Bali. "Kita akar kawal prosesnya di masing-masing SKPD, karena waktu pencairannya tinggal sebulan lagi (sampai Desember 2015)," tegas Kariyasa.

Secara terpisah, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung, HB Pada Kusuma, mengatakan proposal bansos/hibah sudah maju dari kalangan masyarakat yang difasilitasi Dewan. Dirinya juga

sudah menerima beberapa usulan (proposals bansos) dari masyarakat di Badung.

Menurut Pada Kusuma, pihaknya akan mengawal proses bansos di SKPD lingkup Pemprov Bali ini. "Kita dengar pekan depan sudah mulai proses. Sudah ada beberapa usulan bansos masuk dari Dapil Badung," tegas politisi Golkar asal Geriya Mambal, desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.

Namun demikian, Pada Kusuma mengaku ada juga proposal dari masyarakat yang dikembalikan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi, proposal dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, bukannya bansos hangus.

"Itu tidak masalah. Kita harus lakukan perbaikan proposal, supaya tidak menjadi kendala dalam pencairannya. Kami akan lebih senang karena dipandu betul oleh SKPD. Ketimbang tidak diberitahukan sama sekali, sementara masyarakat banyak berharap. Kitaantisipasi kasus bansos tahun 2013 yang tidak cair, karena waktunya mepet," katanya. **nat**

Edisi : Senin, 16 November 2015

Hal : 1 dan 15



Posisi R-APBD Karangasem 2016 Rawan

★ Ketua FPDIP Juga Kurang Menerima

AMLAPURA, NusaBali

Nasib R-APBD 2016 Kabupaten Karangasem, dalam posisi rawan. Sebelumnya Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi melancarkan penolakan, jika memuat DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) tanpa Perpres 2015. Kali ini, Ketua Fraksi



• NUSABALI/NANTHA
I Gede Dana

PDIP DPRD Karangasem I Gede Dana enggan menerima R-APBD itu. Alasannya DAU dan DAK mesti sah, agar secara sah bisa tertuang di R-APBD 2016, sehingga tidak salah dalam hal penjabaran APBD di kemudian hari.

Di bagian lain Sekkab Karangasem I Gede Adnya Muliadi mengajukan draf R-APBD 2016, semula direncanakan Kamis (12/11) kemudian bergeser jadi Jumat (20/11) kali ini penyeterannya ke meja pimpinan DPRD, Selasa (17/11). Hal itu terungkap secara terpisah di Amlapura, Minggu (15/11).

"Kenapa DAU dan DAK belum sah kita terima, padahal APBN telah sah. Mestinya pejabat eksekutif Karangasem pro aktif berkoordinasi ke pusat," jelas I Gede Dana, mantan Ketua DPRD Karangasem.

I Gede Dana menambahkan, tidak etis katanya membahas R-APBD 2016, kalau DAU dan

DAK belum sah masuk dalam rancangan. "Nanti kalau ada dana yang lebih atau kurang dari alokasi dana dari pusat, lalu bagaimana caranya. DAU dan DAK dulu ada, barulah bisa kita melakukan pembahasan," kata I Gede Dana.

Kalau katanya DAU dan DAK mengacu tahun 2015,

nanti yang definitif belum tentu sama persis sesuai DUA dan DAK sebelumnya. Sehingga bisa menyulitkan neraca APBD 2016, mendatang. Lagi pula akan sulit menghitung defisit. "Bicara defisit, selama ini angkanya cukup besar. Defisit tidak boleh lebih dari dua digit, begitu juga SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran tidak boleh lebih dari dua digit, agar tidak ada kesan kurang mampu menyerap anggaran," tambahnya.

Berbeda dengan pendapat anggota DPRD Karangasem dari Fraksi PDIP I Wayan Sumatra, bisa saja, DAU dan DAK yang tanpa Perpres, tetapi pembahasan R-APBD 2016 bisa jalan terus. "Kan bisa mengacu DAU dan DAK tahun lalu," kata Sumatra.

Penjelasan Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta, sesuai Permendagri No 52 tahun 2015,

kata Sedana Merta, khususnya di huruf (b) dana perimbangan, butir (2) alinea ketiga: Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015.

Butir (3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun

Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan

secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Sekcab Adnya Muliadi menegaskan, draf R-APBD 2016, akhirnya terjadwalkan setor ke meja pimpinan DPRD, Selasa (17/11). "Setelah setor Selasa (17/11) sehingga cukup waktu membahas R-APBD itu, berakhir per 30 November," kata Adnya Muliadi. **k16**

Edisi : Senin, 16 November 2015

Hal : 8



SMP-SMA Tanpa Dana Alokasi Khusus

'Ini berlaku secara nasional, bukan Karangasem saja tidak dapat DAK SMP, SMA dan SMK, tetapi seluruh Indonesia juga demikian' (Kadisdikpora Karangasem)

AMLAPURA, NusaBali

Pusat memblokir alokasi DAK (dana alokasi khusus), terutama untuk sektor pendidikan SMP, SMA dan SMK di tahun 2016. Diduga itu dipicu terlambat mengusulkan ke pusat, sehingga DAK tidak kunjung turun. Hal itu tertuang dalam bocoran draf R-APBD 2016 yang tengah tersusun di Bappeda Karangasem, hingga Minggu (15/11).

DAK 2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem hanya untuk perbaikan sarana dan prasarana SD, sebesar Rp 5,325 miliar, dengan rincian DAK Rp 4,81 miliar ditambah dana pendamping

Perbandingan DAK	
Tahun 2016	
• DAK dari pusat Rp 4,81 miliar	
• Dana pendamping APBD Kabupaten Rp 484,148 juta	
• Total Rp 5,325 miliar	
Tahun 2015	
• DAK dari pusat Rp 11,064 miliar	
• Dana pendamping APBD Kabupaten Rp 1,106 miliar	
• Total Rp 12,17 miliar	

dari APBD Kabupaten Karangasem Rp 484,148 juta total Rp 5,325 miliar.

Nominal itu jauh menurun di bandingkan tahun 2015 dengan Rp 12,17 miliar, rincian DAK dari pusat Rp 11,064 miliar ditambah dana pendamping Rp 1,106 miliar. Justru di tahun 2016 nanti, untuk SMP, SMA dan SMK alokasi DAK Rp 0. Padahal tahun 2015 untuk SMP DAK Rp 4,88 miliar, pendamping Rp 488,226 juta total Rp 5,37 miliar. Untuk SMA DAK Rp 2,61 miliar, dana pendamping Rp 261 juta dan total Rp 2,87 miliar, serta SMK DAK Rp 3,386 miliar dana

pendamping Rp 322,86 juta total Rp 3,551 miliar.

Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta mengakui hal itu dan masih berkoordinasi ke Disdikpora Karangasem. "Apakah ada ketentuan khusus, dari pusat sehingga kali ini tanpa DAK," katanya.

Secara terpisah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora I Gusti Bagus Budiadnyana, mengakui tidak mengusulkan DAK untuk SMP, SMA dan SMK. "Itu menyangkut kebijakan nasional, tidak ada lagi DAK untuk SMP, SMA dan SMK. DAK nanti alokasinya hanya untuk SD, saya tidak tahu alasan pusat," jelas I Gusti Bagus Budi Adnyana.

Diakuinya walau DAK SD didapatkan, tetapi nominalnya jauh menurun di bandingkan tahun 2015. Pembagian DAK katanya, pusat memiliki kewenangan dalam menghitung.

"Ini berlaku secara nasional, bukan Karangasem saja tidak dapat DAK SMP, SMA dan SMK, tetapi seluruh Indonesia juga demikian," tambah pejabat dari desa Peringsari, Kecamatan Selat. **k16**